

## **Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016**

**Novira Sartika<sup>1</sup>, Adrian Irnanda Pratama<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Politeknik Negeri Bengkalis  
e-mail: novirasartika@polbeng.ac.id

<sup>2</sup> Politeknik Negeri Bengkalis  
e-mail: adrianirnandapratama@polbeng.ac.id

---

(Sartika & Pratama, 2019)

Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016. *Moneter*, 6(2), 179–188.

---

**Abstract** - This study aims to determine the financial performance of the Siak Regency Government for the 2012-2016 fiscal year measured by financial ratio analysis. This research method is quantitative descriptive. The data are secondary data in the form of Budget Realization Report (LRA) for the 2012-2016 fiscal year. The analysis shows that the financial performance of the Siak Regency Government measured by ratio of regional financial independence shows very low with an average ratio of 9.83%. Furthermore, if measured by ratio of regional financial efficiency shows efficient with an average ratio of 67.51%. Then when measured by ratio of the effectiveness of Own-Source Revenue (PAD) shows effective with an average ratio of 112.51%. When observed by growth ratio shows fluctuation condition. The Last, measured from the equivalent ratio, especially the ratio of operating expenditure show average ration 64.95% and capital expenditure 31.53%. We conclude that the financial performance of the Siak Regency Government is efficient in terms of spending expenses to obtain revenue with the realization revenue received by government and effective in order to increase revenue of Own-Source Revenue (PAD) to self-financing for government program due to society tend to pay tax and retribution. Beside that the government should maintain success from year to year and focus more on capital expenditure budgeting than operating expenditure budgeting.

**Keywords:** Analysis of Financial Ratios, Performance

### **PENDAHULUAN**

Definisi Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Tujuan utama dari Pemerintahan Daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dalam hal pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infra-struktur, dan penyediaan

barang kebutuhan publik misalnya penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di era reformasi yang dimulai pada 1 Januari 2001 telah memberikan perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain dari Sistem Sentralisasi menjadi Sistem Desentralisasi, dari Sistem Anggaran Tradisional menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, dari Sistem Akuntabilitas Vertikal menjadi Sistem Akuntabilitas Horizontal, dan dari Sistem Akuntansi Single Entry dan Cash Basis menjadi Sistem Akuntansi Double Entry dan Accrual Basis. Otonomi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkat-kan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Laporan keuangan Pemerintahan Daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi Pemerintah Daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010). Fungsi utama dari laporan keuangan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Analisis kinerja keuangan daerah merupakan suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan atas pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan Pemerintahan Daerah dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya Pemerintah Daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya (Sularso dan Restianto, 2011). Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Siak tahun anggaran 2012-2016 yang diukur melalui analisis rasio keuangan meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.

### 1. Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan

menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2013). Kinerja keuangan daerah merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan daerah. Salah satu alat untuk menilai kinerja keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan.

### 2. Analisis Rasio Keuangan

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.

### 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Halim, 2007). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{(\text{Pendapatan Transfer})} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan

kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan Tabel.1 berikut ini.

Tabel 1. Tingkat Kemampuan Daerah dan Pola Hubungan

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Oppier, 2013

- Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

#### 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim, 2007). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{(Realisasi Belanja Daerah)}}{\text{(Realisasi Pendapatan Daerah)}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efektifitas Keuangan daerah

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (%)
>100%	Tidak efisien
100%	Efisien berimbang
<100%	Efisien

Sumber: Mahsun, 2012

#### 5. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{(Realisasi PAD)}}{\text{(Anggaran PAD)}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efektifitas PAD

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas (%)
>100%	Efektif
100%	Efektif berimbang
<100%	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2012

#### 6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2007). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{(P_n - P_0)}{P_0}$$

Keterangan:

- r = Rasio Pertumbuhan  
 $P_n$  = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n  
 $P_0$  = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum-n)

Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan belanja operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

### 7. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007). Ada 2 (dua) perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60%-90%.

Pemerintah Daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi, 2010). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operas } i = \frac{\text{(Total Belanja Operasi)}}{\text{(Total Belanja Daerah)}} \times 100\%$$

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5%-20% (Mahmudi, 2010).

Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{(Total Belanja Modal)}}{\text{(Total Belanja Daerah)}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

## METODOLOGI PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan daerah yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolok ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

### 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### 3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010).

Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

#### 4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P<sub>n</sub> = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P<sub>0</sub> = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum-n)

#### 5. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Ada 2 (dua) perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.

Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60%-90%. Pemerintah Daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi, 2010). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang

dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.

Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5%-20% (Mahmudi, 2010). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Secara geografis, Kabupaten Siak terletak di antara 1°16'30" LU sampai dengan 0°20'49" LU dan 100°54'21" BT sampai dengan 102°10'59" BT. Luas wilayah Kabupaten Siak adalah 8.556,09 Km<sup>2</sup> atau 9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau dan merupakan wilayah terluas ke-6 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura. Secara administrasi, Kabupaten Siak memiliki 14 kecamatan, yang terdiri 9 kelurahan, dan 114 kampung serta 8 kampung adat. Sebelah utara Kabupaten Siak berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti; sebelah selatan Kabupaten Siak berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Pekanbaru; sebelah timur Kabupaten Siak berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kepulauan Meranti; dan sebelah barat Kabupaten Siak berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Jumlah penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2016 sebanyak 453.052 dengan kepadatan penduduk sebesar 53 jiwa/Km<sup>2</sup> (Kabupaten Siak Dalam Angka Tahun 2017).

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Tasik atau danau ini yang apabila dikembangkan dengan serius akan menjadi suatu objek wisata yang menarik. Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Siak masih didominasi oleh 3 (tiga) kategori utama; kategori Pertambangan dan Penggalian menjadi penggerak PDRB terbesar dengan sumbangan di atas 38,85% pada tiga tahun terakhir, disusul oleh kategori Industri Pengolahan dan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Sementara kategori-kategori lainnya masih memberikan distribusi terhadap struktur perekonomian Kabupaten Siak rata-rata di bawah 5%, seperti kategori konstruksi, kategori Pengadaan Listrik dan Gas, kategori Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta kategori lapangan usaha lainnya yang kontribusinya di bawah satu persen dari total PDRB Kabupaten Siak.

## 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak

Anggaran daerah Kabupaten Siak dapat dilihat pada Tabel. 4 di bawah ini.

Tabel. 4 Laporan Realisasi APBD Kabupaten Siak Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun (dalam miliar rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>3.833,89</b>	<b>3.752,35</b>	<b>4.453,17</b>	<b>2.849,78</b>	<b>2.453,57</b>
Pendapatan Asli Daerah	346,60	348,62	309,86	357,28	164,33
Pendapatan Transfer	3.487,28	3.403,73	4.143,30	2.492,50	2.289,24
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-
<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.071,32</b>	<b>2.285,37</b>	<b>2.647,68</b>	<b>2.690,44</b>	<b>1.686,81</b>
Belanja Operasi	1.328,17	1.481,99	1.641,62	1.577,21	1.267,98
Belanja Modal	743,04	803,33	1.005,35	906,13	252,76
Belanja Tidak Terduga	0,11	0,05	0,71	-	0,17
Transfer/Bagi Hasil Ke Daerah	-	-	-	207,10	165,91
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>1.762,57</b>	<b>1.466,97</b>	<b>1.805,49</b>	<b>159,35</b>	<b>766,76</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>745,69</b>	<b>923,46</b>	<b>912,19</b>	<b>911,51</b>	<b>60,83</b>
Penerimaan Pembiayaan	745,69	923,46	912,19	911,51	60,83
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)</b>	<b>2.508,25</b>	<b>2.390,43</b>	<b>2.717,68</b>	<b>1.070,85</b>	<b>827,59</b>

Sumber: Data olahan

Secara garis besar APBD Kabupaten Siak selama periode tahun anggaran 2012-2016 mengalami fluktuasi. Pendapatan daerah Kabupaten Siak tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.4.453.167,51 juta rupiah. Sedangkan untuk belanja daerah tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp.2.690.439,09 juta rupiah. Selanjutnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 2.717.675,14 juta rupiah.

## 3. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Siak

- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)  
Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun hasil perhitungan dari rasio kemandirian

keuangan daerah Kabupaten Siak dapat di lihat pada Tabel. 5 di bawah ini.

Tabel. 5 Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	PAD (dalam juta rupiah)	Pendapatan Transfer (dalam juta rupiah)	RKKD	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2012	346.604,32	3.487.282,37	9,94%	Rendah Sekali	Instruktif
2013	348.618,60	3.403.727,56	10,24%	Rendah Sekali	Instruktif
2014	309.862,79	4.143.304,72	7,48%	Rendah Sekali	Instruktif
2015	357.281,97	2.492.502,60	14,33%	Rendah Sekali	Instruktif
2016	164.325,69	2.289.243,96	7,18%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: Data olahan

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel. 5 di atas tampak bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Siak tergolong rendah sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Siak yaitu sebesar 9,83%. Hal ini berimplikasi bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi) masih sangat tinggi. Nilai rasio kemandirian keuangan daerah terendah terjadi pada tahun 2016 dimana nilainya sebesar 7,18% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 14,33%.

Hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Siak tidak mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang diterima Pemerintah Kabupaten Siak sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah harus lebih giat lagi dalam mengajak dan

menghimbau masyarakatnya untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2014), kinerja keuangan daerah Kota Surakarta jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong pola hubungan Instruktif. Menurut Pramono penyebab terjadinya hal tersebut hampir sama apa yang dijelaskan pada penelitian ini dimana kedua daerah ini yaitu Kabupaten Siak dan Kota Surakarta masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi penerimaan di daerahnya sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pusat saja.

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Adapun hasil perhitungan dari rasio efisiensi keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel. 6 di bawah ini.

Tabel. 6 Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Belanja Daerah (dalam juta rupiah)	Pendapatan Daerah (dalam juta rupiah)	REKD	Kriteria
2012	2.071.317,02	3.833.886,69	54,03%	Efisien
2013	2.285.374,04	3.752.346,16	60,91%	Efisien
2014	2.647.677,64	4.453.167,51	59,46%	Efisien
2015	2.690.439,09	2.849.784,56	94,41%	Efisien
2016	1.686.810,74	2.453.569,65	68,75%	Efisien

Sumber: Data olahan

Berdasarkan perhitungan pada Tabel. 6 di atas dapat diketahui bahwa efisiensi keuangan daerah Kabupaten Siak pada tahun 2012 sampai dengan 2016 tergolong efisien yang dilihat dari nilai rasionya berada di bawah 100%. Hal ini dikarenakan total belanja daerahnya yang lebih kecil dibanding total pendapatan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima sudah efisien. Rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Siak tergolong efisien karena rata-rata rasionya sebesar 67,51%. Dapat dikatakan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengelola keuangannya sudah baik dikarenakan sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya yang tidak melebihi pendapatan daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lazyra (2016), dijelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2011-2015 jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah hanya efisien pada tahun 2013 dan 2014 sedangkan tahun lainnya tidak efisien. Hal tersebut dikarenakan total belanja daerah yang lebih besar dibandingkan total pendapatan daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian ini, dimana rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Siak sudah dikategorikan efisien. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Siak mampu menekan jumlah belanja daerahnya dan menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerahnya dengan baik.

c. Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Adapun hasil perhitungan dari rasio efektifitas PAD dapat dilihat pada Tabel. 7 di bawah ini.

Tabel. 7 Penghitungan Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Realisasi PAD (dalam juta rupiah)	Anggaran PAD (dalam juta rupiah)	Efektifitas PAD	Kriteria
2012	346.604,32	226.935,42	152,73%	Efektif
2013	348.618,60	232.490,25	149,95%	Efektif
2014	309.862,79	292.980,84	105,76%	Efektif
2015	357.281,97	344.696,99	103,65%	Efektif
2016	164.325,69	325.644,75	50,46%	Tidak Efektif

Sumber: Data olahan

Berdasarkan perhitungan pada Tabel. 7 di atas dapat diketahui bahwa efektivitas PAD Kabupaten Siak pada tahun 2012-2016 hampir semuanya efektif kecuali pada tahun 2016 karena nilai rasionya berada di bawah 100% yaitu 50,46%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD sudah dikatakan cukup baik dan sesuai dengan yang ditargetkan. Pemerintah Kabupaten Siak juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan kecuali pada tahun 2016. Selain itu, juga dikarenakan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2014) pada Kota Surakarta dijelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta jika

dilihat dari rasio efektivitas PAD pada tahun 2010 yang berstatus efektif berubah menjadi sangat efektif pada tahun 2011. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Siak hampir seluruhnya sudah efektif kecuali tahun 2016. Kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Akan tetapi masing-masing daerah diharapkan untuk tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Adapun hasil perhitungan dari Pertumbuhan dapat di lihat pada Tabel. 8 di bawah ini.

Tabel. 8 Penghitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Daerah	3.833.886,69	3.752.346,16	4.453.167,51	2.849.784,56	2.453.569,65
Pertumbuhan Pendapatan Daerah	-	-2,13%	18,68%	-36,01%	-13,90%
PAD	346.604,32	348.618,60	309.862,79	357.281,97	164.325,69
Pertumbuhan PAD	-	0,58%	-11,12%	15,30%	-54,01%
Belanja Modal	743.038,84	803.328,62	1.005.348,20	906.133,67	252.760,59
Pertumbuhan Belanja Modal	-	8,11%	25,15%	-9,87%	-72,11%
Belanja Operasi	1.328.166,76	1.481.991,58	1.641.624,16	1.577.209,39	1.267.977,32
Pertumbuhan Belanja Operasi	-	11,58%	10,77%	-3,92%	-19,61%

Sumber: Data olahan

Berdasarkan perhitungan pada Tabel. 8 di atas dapat dilihat bahwa selama periode tahun anggaran 2012-2016 semua rasio mengalami fluktuasi. Pertumbuhan pendapatan daerah pada periode tahun anggaran 2012-2016 hanya pada tahun 2014 memiliki trend positive yaitu sebesar 18,68%. Kemudian, pertumbuhan PAD hanya pada tahun 2013 dan 2015 memiliki pertumbuhan positif. Selanjutnya, pada pos belanja modal hanya pada tahun 2013 dan 2014 yang tumbuh positif sedangkan 2015 dan 2016

cenderung negatif. Terakhir, untuk pertumbuhan belanja operasional kondisinya sama dengan pertumbuhan belanja modal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Assidiqi (2014) di Kabupaten Klaten, rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja daerahnya selalu mengalami perkembangan secara positif karena selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berbeda dengan yang terjadi pada penelitian di Kabupaten Siak, dimana rasionya selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Siak perlu meniru kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

e. Rasio Kecerassian

Rasio kecerassian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Ada 2 (dua) perhitungan dalam rasio kecerassian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Hasil dari perhitungan rasio belanja operasi dapat dilihat pada Tabel. 9 di bawah ini.

Tabel. 9 Penghitungan Rasio Belanja Operasi Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2012	1.328.166,76	2.071.317,02	64,12%
2013	1.481.991,58	2.285.374,04	64,85%
2014	1.641.624,16	2.647.677,64	62,00%
2015	1.577.209,39	2.690.439,09	58,62%
2016	1.267.977,32	1.686.810,74	75,17%

Sumber: Data olahan

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel. 9 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio kecerassian belanja operasi Kabupaten Siak yaitu sebesar 64,95%. Rasio kecerassian tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 75,17% sedangkan rasio kecerassian terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 58,62%. Untuk hasil perhitungan rasio kecerassian belanja modal dapat dilihat pada Tabel. 10 berikut ini.

Tabel. 10 Penghitungan Rasio Belanja Modal Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal
2012	743.038,84	2.071.317,02	35,87%
2013	803.328,62	2.285.374,04	35,15%
2014	1.005.348,20	2.647.677,64	37,97%
2015	906.133,67	2.690.439,09	33,68%
2016	252.760,59	1.686.810,74	14,98%

Sumber: Data olahan



Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel. 10 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja modal Kabupaten Siak sebesar 31,53%. Rasio keserasian tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 37,97% sedangkan rasio keserasian terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 14,98%.

Menurut perhitungan di atas, sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa pengeluaran Pemerintah Kabupaten Siak lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Siak kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Siak diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Assidiqi (2014) di Kabupaten Klaten, alokasi belanja operasinya lebih besar dibandingkan dengan belanja modalnya. Hal tersebut sama dengan penelitian ini, alokasi Belanja Operasi Kabupaten Siak juga lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modalnya. hal itu hampir sama dengan apa yang terjadi di sebagian besar kabupaten di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Siak sudah cukup efisien dalam hal pengeluaran biaya untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima dan sudah cukup efisien dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Namun, masih terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah yaitu meningkatkan penerimaan PAD untuk membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan membayar pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kemampuannya dalam memper-tahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya guna mengevaluasi potensi-potensi daerah yang ada serta lebih menitikberatkan anggaran belanja modal yang merupakan sumber pelayanan kepada masyarakat dibanding anggaran belanja operasi yang merupakan belanja rutin kegiatan pemerintahan.

## REFERENSI

- Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008- 2012. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Havid Sularso, Y. E. R. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi, Vol. 1 No. 2 Agustus 2011, 1*(483), 211–212. <https://doi.org/10.1192/bjp.112.483.211-a>
- Kabupaten, B. P. S. K. S. (2017). Kabupaten Siak Dalam Angka 2017. In *Siak Dalam Angka* (Vol. 2017). SIak. <https://siakkab.bps.go.id>.
- Lazyra, K. (2016). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kota medan. *Skripsi Program Studi Akuntansi, 1*–63.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan: Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.
- Oppier, Hermi. (2013). “Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara”. *Jurnal Benchmark Volume 2* November 2013.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti, 7*, 83–112.
- Undang-undang no 23. (2014). Pemerintah Daerah. *Undang-Undang Republik Indonesia, 460*. Retrieved from <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>

**PROFIL PENULIS**

**NOVIRA SARTIKA** lahir di Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 22 November 1989. Saat ini menjadi dosen di Politeknik Negeri Bengkalis pada Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Jurusan Administrasi Niaga.

**ADRIAN IRNANDA PRATAMA** lahir di Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau pada tanggal 17 November 1989. Saat ini menjadi dosen di Politeknik Negeri Bengkalis pada Program Studi Administrasi Bisnis Internasional Jurusan Administrasi Niaga.